

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. Sehingga prioritas pembangunan diletakkan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja.

Salah satu hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, yaitu potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, jumlah pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya terhadap ekspor nasional, penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah kebutuhan akan pangan secara langsung juga akan ikut bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut petani untuk meningkatkan produksinya.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 17 tahun 2011. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan. Pengadaan dan penyaluran pupuk itu sendiri harus memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu. Pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian pupuk di antaranya ada pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga komponen penting ini saling bekerjasama dan berhubungan, komponen tersebut adalah “negara/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”. Pemerintah adalah Disperindagsar, sektor swasta adalah distributor dan pengecernya.¹ Fungsi dan peran pemerintah disini hanya mengarahkan pasar sedangkan publik diposisikan sebagai pelanggan. Menurut Sumartono, yang memiliki konsep bahwa pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Perlu ditekankan kembali bahwasanya dalam pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi tidak hanya dilakukan oleh Disperindagsar sendiri tetapi juga melakukan kerja sama dengan pihak distributor sebagai pihak swasta. Kemudian peran dari masyarakat menurut Sjamsuddin, adalah masyarakat yang memfasilitasi interaksi sosial politik, menggerakkan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

Sistem distribusi pupuk yang disalurkan oleh perusahaan ke petani di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Sompe memiliki mekanisme 3 arah yaitu dari produsen ke distributor dan distributor ke pengecer dan pengecer ke konsumen.

Perusahaan disini ialah PT Pertani (Persero) selaku distributor di ibukota provinsi makassar kemudian di distribusikan ke perusahaan cabang yang ada di kabupaten pinrang kemudian didistribusikan lagi ke pengecer yang kemudian di ambil oleh petani, pengambilan pupuk sendiri berada di tempat pengecer untuk wilayah Desa Samaenre berada di Dusun Katteong dan Dusun Tosulo untuk mengambil pupuk yang telah didistribusikan dengan memperlihatkan kartu tani dan pembayaran di lokasi pengecer sembari melihat data petani yang ada di Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tani.

Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang adalah salah satu desa yang penduduknya sebagian besar adalah petani dan memiliki hektar sawah yang sangat luas, tentu ini menjadi potensi yang sangat baik dalam pemenuhan pangan di daerah, baik di kabupaten maupun provinsi yang memang Kab. Pinrang merupakan daerah penghasil beras terbaik di Indonesia. Bicara mengenai kebutuhan petani, tentu tidak lepas kaitannya dengan pupuk, hal paling penting yang selalu di butuhkan petani untuk produktivitas dan kualitas padi yang di hasilkan. Petani di desa ini sendiri mendapatkan pupuk melalui distribusi yang dilakukan pemerintah, kebutuhan petani akan pupuk di Desa Samaenre sangatlah penting dan dibutuhkan namun masalah yang terjadi beberapa kali petani di desa ini tidak mendapatkan pupuk sesuai waktunya padahal sudah sangat di butuhkan.

Ketersediaan pupuk di lapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya. Selain itu, dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan di sisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan selalu kurang di lapangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka perlu adanya partisipasi dan kerja sama dari

berbagai pihak, dengan kata lain berkontribusi secara aktif sehingga pupuk bersubsidi tersebut dapat tersalurkan dengan baik hingga ke petani. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Tabel 1.1 Data Alokasi Pupuk di Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Tahun	Total Penerima pupuk (NIK)	Luas Tanam (Ha)	Jenis Pupuk (Kg)				
			Urea	ZA	SP36	NPK	Organik
2019	220	650,55	162.623	32.513	65.055	195.165	325.275
2020	787	1.730,67	432.607	86.469	173.067	519.201	865.335
2021	782	1.635,62	246.286	159.832	1.000	490.686	817.81

Sumber Data : BPP Kecamatan Mattiro Sompe

Berdasarkan data diatas, ketersediaan pupuk di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat drastis terutama pada tahun 2019 ke tahun 2020 data akan kebutuhan pupuk terlihat pada jumlah penerima dan luas tanam yang dimiliki oleh petani, sampai pada awal tahun ini data yang tercatat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya walaupun penurunannya sangat sedikit.

Kebutuhan Pupuk untuk petani memang sangat di butuhkan, bicara mengenai ketersediaan pupuk pihak dari BPP Kecamatan Mattiro Sompe mengatakan bahwa ketersediaan pupuk untuk petani secara keseluruhan memang sudah cukup tiap tahunnya namun lambatnya pupuk datang atau sampai ke pengecer dan petani di

sebabkan oleh faktor produksi dari perusahaan yang ada di provinsi sehingga harapannya dari perusahaan perlu meningkatkan produksinya untuk mempercepat jalur distribusi mengingat efek yang ditimbulkan apabila pupuk benar-benar lambat datang namun sudah sangat dibutuhkan pasti mempengaruhi produktivitas petani sehingga berefek pada produksi beras dan pemenuhan pangan dalam negeri.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai Tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan

antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (al-Hasyr: 7) agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil. Islam juga melarang hal-hal yang menghambat proses pendistribusian, yaitu: penimbunan. Islam melarang penimbunan yang dapat menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah banyak yang kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar barang tidak hanya beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu.

Pada saat ini, realitas yang tampak dalam masyarakat adalah banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan dan penyimpangan distribusi barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan, dan akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. sehingga mengakibatkan harga pupuk di pasaran naik. Realitas tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi berdampak pada langkanya barang-barang produksi sehingga harga barang di pasaran melambung tinggi, bahkan banyak juga warga masyarakat yang kekurangan pangan dan kelaparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, pokok masalah dalam penelitian ini adalah Sistem Distribusi Pupuk Pada Petani Samaenre Kab. Pinrang Berdasarkan Ekonomi Islam dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk di Desa Samenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap sistem distribusi pupuk di Desa Samenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme distribusi pupuk di Desa Samenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap sistem distribusi pupuk di Desa Samenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem distribusi pupuk pada petani serta sudut pandang dari pandangan ekonomi Islam mengenai sistem distribusi pupuk pada petani di Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi sebagai tambahan informasi, masukan maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan.

